



Penguatan Ketahanan Sosial melalui *Deliberative Civic Resilience Model (DCRM)* Menjelang Pilkada Serentak di Kabupaten Jombang

¹Novy Setia Yunas, ²Romel Masykuri, ³Ika Rizki Yustisia, ⁴Supriyono, ⁵Dwindra Setyo Nugroho

¹² Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang

³ Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang

⁴⁵ Pemerintah Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Koresponden Author: novysetiayunas@ub.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 23 th May 2026 Revised: 28 th July 2026 Published: 28 th August 2026	The simultaneous Village Head Elections (Pilkades) have the potential to trigger social fragmentation, community polarization, and the spread of digital disinformation at the village level. This situation poses a significant challenge in maintaining social cohesion ahead of the 2027 simultaneous Pilkadaes in Jombang Regency. This community service activity aims to strengthen the civic resilience of village communities through the implementation of the Deliberative Civic Resilience Model (DCRM) in Perak District, Jombang Regency. The activity is carried out using a community-based participatory approach through deliberative forums, contextual digital literacy, social conflict simulations, and behavior-based nudge approaches. Participants include students, youth, community leaders, Linmas members and village community representatives as strategic actors in maintaining social resilience at the local level. Evaluation was carried out through simple measurements using pre-tests and post-tests, observation, and participatory reflection by the participants. The evaluation results showed an increase in participants understanding of potential Pilkadaes conflicts from 61% to 90%, understanding of the dangers of digital misinformation from 58% to 92%, and understanding of the importance of maintaining social cohesion through communication and dialogue from 64% to 93%. In addition, the deliberative forum successfully created a more inclusive space for dialogue, while the conflict simulation helped participants understand the importance of resolving conflicts through communication and deliberation. Overall, the implementation of DCRM showed potential as a model for strengthening social resilience in village communities by integrating deliberation, digital literacy, conflict simulation and community communication to support a more adaptive and sustainable local democracy ahead of Pilkadaes.
Keywords: <i>civic resilience; deliberative civic resilience; digital literacy; democracy; village head election; democracy; political education</i>	
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 23 Mei 2026 Direvisi: 28 Juli 2026 Dipublikasi: 18 Agustus 2026	Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berpotensi memunculkan fragmentasi sosial, polarisasi masyarakat, dan penyebaran disinformasi digital di tingkat desa. Kondisi tersebut menjadi tantangan penting dalam menjaga kohesi sosial menjelang Pilkadaes serentak tahun 2027 di Kabupaten Jombang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat <i>civic resilience</i>

Kata kunci deliberative civic resilience; ketahanan sosial; pilkades; demokrasi; pendidikan politik; literasi digital	masyarakat desa melalui implementasi Deliberative Civic Resilience Model (DCRM) di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas melalui forum deliberatif, literasi digital kontekstual, simulasi konflik sosial, serta pendekatan perilaku berbasis <i>nudge</i> . Peserta kegiatan terdiri atas pelajar, generasi muda, tokoh masyarakat, unsur Linmas, dan perwakilan masyarakat desa sebagai aktor strategis dalam menjaga ketahanan sosial di tingkat lokal. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran sederhana menggunakan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> , observasi, serta refleksi partisipatif peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai potensi konflik PilkaDes dari 61% menjadi 90%, pemahaman terhadap bahaya disinformasi digital dari 58% menjadi 92%, serta pemahaman mengenai pentingnya menjaga kohesi sosial melalui komunikasi dan dialog dari 64% menjadi 93%. Selain itu, forum deliberatif berhasil membangun ruang dialog yang lebih inklusif, sedangkan simulasi konflik membantu peserta memahami pentingnya penyelesaian konflik melalui komunikasi dan musyawarah. Secara keseluruhan, implementasi DCRM menunjukkan potensi sebagai model penguatan ketahanan sosial masyarakat desa yang mengintegrasikan deliberasi, literasi digital, simulasi konflik, dan komunikasi komunitas untuk mendukung demokrasi lokal yang lebih adaptif dan berkelanjutan menjelang PilkaDes.
---	---

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk praktik demokrasi di level lokal yang memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan pemilihan pada tingkat yang lebih tinggi. Pilkades tidak hanya menjadi arena kompetisi elektoral, tetapi juga berkelindan erat dengan relasi sosial masyarakat desa yang berbasis pada kekerabatan, kedekatan emosional, dan jaringan sosial yang relatif homogen. Dalam konteks ini, dinamika politik lokal sering kali tidak berhenti pada perbedaan preferensi politik, tetapi berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang berdampak pada kohesi masyarakat dalam jangka panjang (Aspinall & Sukmajati, 2016; Hadiz, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam demokrasi lokal semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat. Media sosial dan platform komunikasi berbasis komunitas, seperti grup WhatsApp, telah menjadi ruang utama untuk bertukar informasi politik di tingkat desa. Namun, perkembangan ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas literasi digital masyarakat, sehingga memunculkan fenomena penyebaran disinformasi, polarisasi opini, dan fragmentasi sosial yang semakin tajam (Lim, 2017; Tapsell, 2021). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa ekosistem komunikasi digital lokal cenderung menciptakan *echo chamber* yang memperkuat bias kelompok dan mempercepat eskalasi konflik sosial di tingkat akar rumput (Cinelli et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut menjadi semakin relevan menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Jombang yang direncanakan akan berlangsung pada tahun 2027. Karakter masyarakat desa di Jombang yang memiliki ikatan sosial kuat menjadi faktor yang dapat memperbesar potensi terjadinya konflik horizontal apabila tidak diimbangi dengan kapasitas masyarakat untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Dengan demikian, tantangan utama dalam Pilkades bukan hanya terletak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di tengah kontestasi politik.

Selama ini, pendekatan pendidikan politik yang dilakukan dalam konteks masyarakat desa masih didominasi oleh metode konvensional yang bersifat informatif dan satu arah. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan politik tanpa memperhatikan dimensi perilaku, emosi, dan relasi sosial dalam masyarakat. Padahal, literatur mutakhir menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara deliberatif, yaitu melalui dialog yang rasional, inklusif, dan setara (Dryzek, 2010; Fishkin, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan politik yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga transformatif dan berbasis pengalaman sosial.

Dalam kerangka tersebut, konsep *civic resilience* menjadi semakin penting sebagai landasan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. *Civic resilience* merujuk pada kemampuan individu dan komunitas untuk bertahan, beradaptasi dan tetap kohesif dalam menghadapi tekanan sosial-politik (Norris, 2011). Dalam konteks demokrasi lokal, *civic resilience* tidak hanya berkaitan dengan tingkat partisipasi politik, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengelola konflik, menyaring informasi, serta menjaga hubungan sosial di tengah perbedaan pilihan politik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat *civic resilience* yang tinggi cenderung lebih mampu menghindari eskalasi konflik dan mempertahankan stabilitas sosial dalam situasi kontestasi politik (Berkes & Ross, 2013).

Untuk memperkuat *civic resilience*, pendekatan *deliberative democracy* menawarkan kerangka yang relevan untuk membangun kapasitas dialog masyarakat. Deliberasi publik memungkinkan masyarakat untuk bertukar argumen secara rasional dan reflektif, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan kolektif yang lebih inklusif (Curato et al., 2017; Habermas, 1996). Dalam konteks masyarakat desa, pendekatan deliberatif menjadi penting karena mampu mengakomodasi keragaman perspektif sekaligus menjaga kohesi sosial.

Selain itu, perkembangan kajian kebijakan publik juga menunjukkan pentingnya pendekatan *behavioral public policy*, khususnya melalui konsep *nudge*, dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat secara efektif tanpa paksaan (Thaler & Sunstein, 2008). Dalam konteks Pilkadaes, intervensi berbasis *nudge* dapat digunakan untuk mendorong perilaku positif, seperti tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menjaga hubungan sosial meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. Integrasi antara pendekatan deliberatif dan behavioral ini menjadi kunci dalam membangun intervensi sosial yang tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat.

Berangkat dari kerangka teoritis tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini mengembangkan dan mengimplementasikan *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) sebagai pendekatan inovatif untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Model ini dirancang sebagai integrasi antara pendekatan *civic resilience*, demokrasi deliberatif, dan intervensi perilaku berbasis *nudge*, yang dioperasionalkan melalui berbagai metode partisipatif, seperti simulasi konflik sosial, forum deliberatif masyarakat, serta literasi digital yang kontekstual.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) dalam konteks penguatan *civic resilience* masyarakat desa serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah fragmentasi sosial menjelang Pilkadaes serentak. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis dalam bentuk model intervensi sosial yang aplikatif, tetapi juga memperkaya kajian akademik mengenai pengembangan pendekatan deliberatif dalam pendidikan politik berbasis komunitas.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas (*community-based participatory approach*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak bersifat *top-down*, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial masyarakat lokal, sehingga memiliki potensi keberlanjutan yang lebih tinggi (van Kempen, 2014). Secara konseptual, kegiatan ini mengadopsi dan

menerapkan penggunaan *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM), yaitu model intervensi sosial yang mengintegrasikan pendekatan *civic resilience*, demokrasi deliberatif, dan intervensi perilaku berbasis *nudge* untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola perbedaan politik, mencegah konflik sosial, dan menghadapi dinamika informasi digital.

Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan melibatkan masyarakat desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal sebagai partisipan utama. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan relevansi dengan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2027, serta adanya kebutuhan nyata dari mitra terkait penguatan ketahanan sosial masyarakat. Proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap *social mapping* untuk mengidentifikasi kondisi awal masyarakat, termasuk potensi konflik, pola komunikasi sosial, serta tingkat literasi digital. Data pada tahap ini diperoleh melalui observasi lapangan, diskusi awal dengan mitra, serta identifikasi permasalahan bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan tahap peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyampaian materi terkait *civic resilience*, pentingnya menjaga kohesi sosial dalam konteks demokrasi desa, serta pemahaman mengenai risiko disinformasi dalam Pilkades. Tahap ini dilakukan secara interaktif melalui diskusi kelompok agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, dilakukan simulasi konflik sosial sebagai bentuk *experiential learning*, di mana peserta diajak untuk memahami secara langsung dinamika konflik yang mungkin terjadi dalam Pilkades, sekaligus melatih kemampuan merespons konflik secara konstruktif.

Sebagai bagian dari pendekatan deliberatif, kegiatan ini juga menyelenggarakan forum deliberatif masyarakat yang melibatkan berbagai kelompok. Forum ini bertujuan untuk membangun dialog terbuka, meningkatkan saling pengertian antarmasyarakat, serta memperkuat kesepahaman bersama dalam menjaga stabilitas sosial. Selain itu, kegiatan ini dilengkapi dengan pelatihan literasi digital kontekstual yang difokuskan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, mengenali hoaks, serta menggunakan media digital secara bijak dalam menghadapi isu-isu Pilkades.

Untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan, dilakukan intervensi berbasis pendekatan *nudge* melalui penguatan pesan sosial yang disampaikan melalui media komunitas, seperti poster, slogan, dan pesan digital. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk norma sosial yang mendorong perilaku kooperatif, seperti tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta tetap menjaga hubungan sosial meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut didukung oleh proses pendampingan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat guna memastikan keberlanjutan program serta kemampuan mengelola dinamika sosial secara mandiri.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi lembar observasi, instrumen pre-test dan post-test sederhana, lembar refleksi peserta, serta dokumentasi kegiatan sebagai data pendukung pelaksanaan program. Data dikumpulkan melalui observasi selama pelaksanaan kegiatan, hasil pre-test dan post-test, dokumentasi kegiatan, serta refleksi partisipatif peserta pada akhir kegiatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif yang berasal dari hasil observasi, dokumentasi, dan refleksi peserta dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2019) (Miles et al., 2019). Sementara itu, hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang (Creswell & Creswell, 2018). Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pendekatan pre-test dan post-test yang dikombinasikan

dengan refleksi partisipatif bersama peserta sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi model DCRM dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berangkat dari konteks mendasar bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan hanya agenda elektoral di tingkat lokal, tetapi juga fenomena sosial yang dapat mempengaruhi kohesi masyarakat di desa. Di tengah masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial yang sangat erat, berbasis kekerabatan, kedekatan emosional, relasi keagamaan dan jaringan komunitas, perbedaan pilihan politik sering kali tidak berhenti pada preferensi elektoral semata, melainkan berpotensi berkembang menjadi ketegangan sosial yang bisa bertahan cukup lama.

Kondisi ini yang pada akhirnya menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya Pemerintah Kecamatan Perak sebagai mitra pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat, mengingat Kabupaten Jombang akan menghadapi agenda Pilkades serentak pada tahun 2027. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Perak membutuhkan pendekatan penguatan kapasitas masyarakat yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun kesadaran kolektif, kemampuan dialog, literasi digital, serta ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi potensi fragmentasi politik di desa.

Pada analisis situasi mitra telah menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi di tingkat desa bukan semata rendahnya pengetahuan politik masyarakat, tetapi lebih kompleks, yaitu belum kuatnya kapasitas sosial dalam mengelola perbedaan pilihan secara konstruktif. Berdasarkan identifikasi awal bersama mitra, terdapat beberapa kecenderungan persoalan yang kerap muncul pada momentum Pilkades, antara lain polarisasi antarpengukung calon, munculnya rumor politik, penyebaran informasi tidak terverifikasi melalui grup *WhatsApp* dan media sosial, menurunnya intensitas komunikasi antar masyarakat dengan pilihan berbeda, serta potensi ketegangan pasca pemilihan. Situasi ini dalam literatur kajian demokrasi lokal tentu sejalan dengan kajian Aspinall dan Sukmajati (2016) yang menunjukkan bahwa politik lokal di Indonesia sering bekerja melalui relasi sosial yang sangat personal, sehingga kontestasi elektoral dapat berdampak langsung pada hubungan sosial masyarakat (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Dalam konteks demokrasi desa, konflik tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan yang terbuka. Konflik seringkali muncul secara lebih halus melalui kerenggangan hubungan sosial, terbentuknya kelompok-kelompok dukungan yang eksklusif, saling menaruh kecurigaan antar masyarakat, serta melemahnya kepercayaan sosial. Hal ini menjadi tantangan serius karena modal sosial merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat desa. Dalam kajian Putnam (2000) dijelaskan bahwa kepercayaan, jaringan sosial dan norma timbal balik merupakan elemen penting yang menopang kehidupan komunitas (Putnam, 2000). Ketika kontestasi politik merusak modal sosial yang ada, maka dampaknya tidak hanya terjadi pada masa pemilihan, tetapi juga dapat mempengaruhi kerja sama masyarakat di dalam pembangunan desa setelah gelaran Pilkades tersebut selesai. Maka tidak heran, jika kondisi yang seringkali kita jumpai di desa bahwa ada ketidakmerataan pembangunan di desa hanya karena dahulu ketika masa Pilkades masyarakat atau di tempat tertentu tidak mendukung salah satu calon yang akhirnya memenangkan kontestasi. Ini realitas sosial yang nyata dan seringkali kita jumpai di desa.

Problem lain yang seringkali muncul adalah meningkatnya peran media digital dalam membentuk opini politik masyarakat desa. Informasi mengenai calon, isu kampanye, klaim keberhasilan, hingga rumor personal sering kali menyebar melalui kanal komunikasi informal seperti grup *WhatsApp* keluarga, grup RT/RW, grup keagamaan dan media sosial yang ada di desa. Tanpa literasi digital yang memadai, ruang digital ini dapat mempercepat penyebaran disinformasi dan memperkuat polarisasi sosial masyarakat di desa (Setianingrum et al.,

2025). Kajian Lim (2017) menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia dapat membentuk ruang-ruang algoritmik yang memperkuat sentimen kelompok, sementara kajian Tapsell (2021) menekankan bahwa ekosistem digital di Indonesia berperan besar dalam membentuk opini publik dan kontestasi politik (Lim, 2017; Tapsell, 2021). Dalam konteks desa, tentu persoalan ini menjadi lebih sensitif karena informasi digital tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan hubungan sosial yang dekat dan emosional.

Berangkat dari analisis situasi tersebut di lapangan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan menerapkan *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) sebagai model intervensi sosial berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam skema Program Dosen Berkarya (DOKAR) Universitas Brawijaya tahun 2026 oleh tim yang terdiri atas Novy Setia Yunas sebagai Ketua Tim; Romel Masykuri sebagai anggota dengan fokus pada kajian konflik sosial dan politik lokal; serta Ika Rizki Yustisia sebagai anggota dengan kepakaran dalam komunikasi dan media. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Kabupaten Jombang yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah Kecamatan Perak. Konfigurasi tim ini tentu menjadi penting karena persoalan Pilkades membutuhkan pendekatan lintas perspektif, mulai dari perspektif ilmu politik yang dalam hal ini digunakan untuk memahami demokrasi lokal, kajian konflik untuk membaca potensi fragmentasi sosial, serta perspektif ilmu komunikasi untuk merespons dinamika media digital dan disinformasi yang seringkali berkembang di tengah masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan pelajar, generasi muda, tokoh masyarakat, serta sebagian unsur perlindungan masyarakat (Linmas) sebagai peserta utama. Komposisi peserta ini dipilih karena mereka merupakan elemen strategis dalam membangun ketahanan sosial di tingkat desa menjelang pelaksanaan Pilkades serentak. Pelajar dan generasi muda memiliki posisi penting sebagai agen perubahan (*agents of change*) yang diharapkan mampu menjadi penggerak literasi digital, penyebaran informasi yang bertanggung jawab, serta penguatan budaya demokrasi yang sehat di lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat berperan dalam membangun norma sosial, memperkuat kohesi masyarakat, dan menjadi rujukan dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial di tingkat lokal. Adapun unsur Linmas memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban lingkungan, mendeteksi potensi kerawanan sosial, serta mendukung upaya pencegahan konflik di masyarakat. Dengan melibatkan berbagai kelompok tersebut, kegiatan ini tidak hanya memberikan penguatan kapasitas kepada individu peserta, tetapi juga membangun jejaring aktor lokal yang diharapkan mampu menjadi penggerak terciptanya situasi sosial yang kondusif menjelang maupun setelah pelaksanaan Pilkades.



Gambar 1. Materi dari Narasumber tentang Ketahanan Sosial dan Demokrasi di Desa yang disampaikan oleh Novy Setia Yunas selaku Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) mampu memperluas pemahaman peserta tentang pentingnya ketahanan sosial dalam demokrasi desa. Pada tahap awal, sebagian peserta masih memahami Pilkades sebatas proses pemilihan pemimpin desa saja. Namun, melalui proses diskusi dan refleksi diantara peserta dan fasilitator, peserta mulai melihat bahwa Pilkades merupakan momentum demokrasi di tingkat lokal yang membutuhkan kesiapan sosial masyarakat agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi konflik. Pemahaman ini penting karena *civic resilience* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan dalam situasi krisis, tetapi juga dengan kemampuan untuk menjaga kohesi, beradaptasi dan membangun respons kolektif terhadap tekanan sosial-politik (Berkes & Ross, 2013; Norris, 2011).

Salah satu capaian penting lainnya dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran peserta terhadap risiko disinformasi digital dalam Pilkades. Melalui sesi literasi digital kontekstual, peserta diajak untuk mengidentifikasi ciri informasi provokatif, memahami pola penyebaran rumor serta membedakan informasi faktual dari opini atau narasi yang disengaja untuk memanipulasi. Peserta juga didorong untuk tidak secara langsung membagikan informasi politik yang sumbernya belum jelas. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis dalam menggunakan media, tetapi juga sebagai kapasitas kritis untuk membaca informasi secara bertanggung jawab. Pendekatan ini relevan dengan kajian Van Dijck, Poell, dan De Waal (2018) yang menegaskan bahwa platform digital itu posisinya tidak netral, karena media sosial membentuk cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi dan muaranya adalah membangun persepsi publik (van Dijck et al., 2018).

Selain literasi digital, forum deliberatif masyarakat menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan. Forum deliberatif dilaksanakan dengan mempertemukan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur Linmas dalam satu forum diskusi. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman, persepsi, dan kekhawatiran mengenai potensi konflik menjelang Pilkades, kemudian bersama-sama menyusun prinsip-prinsip bersama untuk menjaga kondusivitas sosial, seperti menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, menjaga komunikasi lintas kelompok pendukung, serta mengutamakan musyawarah apabila muncul perbedaan pendapat.

Secara teoretik, hasil tersebut menunjukkan relevansi pendekatan demokrasi deliberatif dalam penguatan demokrasi lokal. Kajian penting dari Habermas (1996) menekankan pentingnya ruang komunikasi rasional dalam membangun legitimasi sosial, sementara Dryzek (2010) melihat deliberasi sebagai mekanisme untuk mengelola kompleksitas dan perbedaan dalam masyarakat demokratis (Dryzek, 2010; Habermas, 1996). Di sisi lain, merujuk pada kajian Curato et al. (2017) yang menegaskan bahwa deliberasi dapat memperkuat pemahaman bersama, terutama di masyarakat yang menghadapi polarisasi (Curato et al., 2017). Dalam kegiatan ini, forum deliberatif tidak hanya menjadi metode diskusi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial yang membantu peserta melihat konflik bukan sebagai sesuatu yang harus diwariskan, melainkan sebagai dinamika yang dapat dikelola melalui komunikasi yang sehat.

Komponen simulasi konflik sosial juga memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran peserta. Dalam pelaksanaan simulasi, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diberikan skenario mengenai penyebaran informasi yang belum terverifikasi melalui grup WhatsApp desa menjelang Pilkades. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi potensi konflik yang dapat muncul, aktor-aktor yang terlibat, serta merumuskan langkah penyelesaian melalui dialog dan musyawarah. Setelah simulasi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang kemudian menjadi bahan

refleksi bersama mengenai pentingnya komunikasi yang konstruktif dalam mencegah eskalasi konflik sosial.

Berdasarkan praktik simulasi tersebut, peserta diperlihatkan bagaimana konflik dapat berkembang dari hal sederhana, seperti pesan provokatif di grup masyarakat, tuduhan terhadap calon tertentu, atau perbedaan pilihan dalam keluarga, menjadi ketegangan sosial yang lebih luas apabila tidak segera dikelola. Pendekatan berbasis pengalaman ini membuat peserta lebih mudah memahami konsekuensi sosial dari tindakan komunikasi sehari-hari (Alkhajar et al., 2025). Dalam konteks pengabdian masyarakat, metode seperti ini lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah karena peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga ikut mengalami, menilai, dan merefleksikan situasi sosial yang dekat dengan kehidupan mereka.

Pendekatan *nudge* juga diterapkan melalui penguatan pesan-pesan sosial yang sederhana, mudah diingat dan relevan dengan konteks masyarakat desa. Pesan seperti pentingnya “beda pilihan tetap rukun”, “saring sebelum sharing”, dan “Pilkades selesai, persaudaraan tetap berjalan” diarahkan untuk membentuk norma sosial yang lebih kooperatif untuk masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari gagasan Thaler dan Sunstein (2008) bahwa perubahan perilaku dapat didorong melalui desain pilihan dan pesan sosial yang tidak memaksa, tetapi mengarahkan individu pada keputusan yang lebih baik (Thaler & Sunstein, 2008). Dalam konteks Pilkades, pendekatan *nudge* menjadi relevan karena masyarakat tidak cukup hanya diberi pengetahuan, tetapi juga perlu didorong melalui norma, simbol dan pesan kolektif yang mudah dipahami.

Kemudian setelah kegiatan dilaksanakan, tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah tahapan evaluasi dan monitoring terhadap capaian kegiatan. Tahapan evaluasi dan monitoring dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi evaluatif, refleksi bersama dan pengukuran sederhana terhadap pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Para peserta kegiatan yang terdiri dari kepala desa, tokoh masyarakat, perangkat desa dan unsur Linmas menunjukkan respons positif terhadap materi dan metode yang digunakan. Secara umum, terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pencegahan konflik sejak dini, perlunya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi politik digital, serta perlunya membangun komunikasi sosial yang lebih dialogis di tingkat desa. Peserta juga mulai memahami bahwa stabilitas sosial desa bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.



Gambar 2. Foto bersama setelah kegiatan bersama para peserta dan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Jombang selaku fasilitator dan mitra

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, tim pengabdian melakukan pengukuran sederhana melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil evaluasi secara deskriptif menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang diukur. Sebelum kegiatan dilaksanakan, hanya sekitar 61% peserta yang memahami bahwa potensi konflik Pilkades tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga dengan keretakan hubungan sosial di masyarakat. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, persentase tersebut meningkat menjadi 90%. Peningkatan juga terlihat pada pemahaman mengenai bahaya disinformasi digital, dari 58% sebelum kegiatan menjadi 92% setelah kegiatan, serta pada pemahaman mengenai pentingnya menjaga kohesi sosial melalui komunikasi dan dialog yang meningkat dari 64% menjadi 93%.

Monitoring kegiatan juga menunjukkan bahwa unsur Linmas memiliki posisi strategis yang selama ini sering dipahami secara terbatas. Linmas tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi aktor sosial yang membantu mendeteksi potensi ketegangan, menyampaikan informasi yang menenangkan, serta mendukung komunikasi preventif di masyarakat. Demikian pula tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai penjaga norma sosial, sementara perangkat desa dapat berfungsi sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa pencegahan konflik Pilkades membutuhkan ekosistem sosial yang melibatkan banyak aktor, bukan hanya penyelenggara pemilihan atau aparat formal.

Capaian kualitatif tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pencegahan konflik sejak dini, literasi digital, serta penguatan ketahanan sosial dalam menghadapi Pilkades serentak. Meskipun pengukuran dilakukan secara sederhana sebagai bagian dari evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, hasil tersebut mengindikasikan bahwa kombinasi penyampaian materi, simulasi konflik, forum deliberatif, dan refleksi partisipatif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas peserta dalam memahami dan merespons potensi konflik sosial di tingkat desa.

Dari sisi capaian program, tentu kegiatan ini telah berhasil memperkuat tiga aspek utama. Pertama, aspek kognitif, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai potensi konflik Pilkades, disinformasi digital, serta pentingnya ketahanan sosial. Kedua, aspek afektif, yaitu tumbuhnya kesadaran bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak hubungan sosial di masyarakat desa. Ketiga, aspek praktis, dimana muncul komitmen peserta untuk mendorong komunikasi yang lebih sehat, tidak mudah menyebarkan informasi provokatif, serta menjaga kerukunan masyarakat menjelang Pilkades. Ketiga capaian ini menunjukkan bahwa *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) dapat berfungsi sebagai model intervensi yang menghubungkan pendidikan politik, dialog masyarakat, literasi digital dan perubahan perilaku sosial.

Jika dikaitkan dengan perkembangan kajian pengabdian masyarakat, kegiatan ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis pada kebutuhan mitra. Sejalan dengan kajian Mansuri dan Rao (2014) menekankan bahwa program berbasis partisipasi akan lebih efektif apabila masyarakat dan aktor lokal tidak hanya ditempatkan sebagai objek, tetapi juga sebagai bagian dari proses identifikasi masalah dan perumusan solusi (van Kempen, 2014). Dalam kegiatan ini, tentu saja Pemerintah Kecamatan Perak tidak hanya berperan sebagai mitra dan lokasi penyelenggaraan kegiatan saja, tetapi juga sebagai mitra implementatif yang membantu membaca kebutuhan lokal, memfasilitasi peserta serta memastikan relevansi kegiatan dengan dinamika menjelang Pilkades pada tahun 2027 mendatang.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) memiliki potensi yang kuat sebagai model untuk memperkuat

ketahanan sosial masyarakat desa dalam menghadapi kontestasi politik lokal. Pendekatan *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan pendidikan politik, tetapi juga sebagai model intervensi sosial yang mengintegrasikan dimensi deliberatif, literasi digital, simulasi konflik serta perubahan perilaku berbasis komunitas. Dengan model ini, masyarakat tidak hanya diberi pemahaman tentang demokrasi, tetapi juga dilatih untuk menjaga relasi sosial, mengelola informasi dan membangun respons kolektif terhadap potensi konflik. Oleh karena itu, pendekatan *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) memiliki peluang untuk dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam penyelenggaraan Pilkadaes maupun kontestasi politik lokal lainnya.

Dari perspektif akademik, kegiatan Pengabdian Masyarakat ini memperkuat argumen bahwa kualitas demokrasi lokal tidak cukup diukur dari terselenggaranya kontestasi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam menjaga kohesi sosial setelah kontestasi itu selesai diselenggarakan. Demokrasi desa yang sehat membutuhkan masyarakat yang tidak hanya aktif menyalurkan hak pilihnya, melainkan juga masyarakat yang mampu membangun dialog, menyaring informasi, menahan diri dari provokasi, serta menjaga hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian Masyarakat ini memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kecamatan Perak dan Pemerintah Kabupaten Jombang, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan model pendidikan politik deliberatif yang relevan dengan tantangan demokrasi lokal di era digital saat ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui implementasi *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa penguatan ketahanan sosial masyarakat desa menjelang Pilkadaes serentak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan pendidikan politik konvensional yang bersifat satu arah dan informatif. Dinamika demokrasi desa di era saat ini memperlihatkan bahwa tantangan utama masyarakat tidak hanya berkaitan dengan partisipasi politik, tetapi juga dengan kemampuan menjaga kohesi sosial, mengelola perbedaan pilihan politik serta menghadapi arus informasi digital yang berpotensi memicu fragmentasi sosial.

Melalui pendekatan deliberatif berbasis komunitas yang mengintegrasikan forum dialog masyarakat, literasi digital secara kontekstual, simulasi konflik sosial dan pendekatan *nudge*, kegiatan ini berhasil memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas sosial desa dalam proses demokrasi lokal. Kegiatan ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta terkait risiko disinformasi digital, pentingnya komunikasi sosial yang lebih dialogis, serta perlunya membangun demokrasi desa yang lebih inklusif dan lebih resilien. Keterlibatan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan unsur Linmas dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan *civic resilience* membutuhkan kolaborasi banyak pihak berbasis komunitas untuk menjaga kondusivitas sosial menjelang Pilkadaes 2027.

Secara substantif, implementasi *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) menunjukkan potensi yang kuat sebagai model penguatan kapasitas sosial masyarakat desa dalam menghadapi kontestasi politik lokal di era digital. Model ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan politik masyarakat, tetapi juga pada pembangunan kemampuan reflektif, komunikasi deliberatif, literasi digital dan penguatan relasi sosial masyarakat desa. Dengan demikian, *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) dapat menjadi rujukan pendekatan alternatif yang relevan dalam pengembangan program pendidikan politik dan penguatan demokrasi lokal yang lebih adaptif terhadap tantangan sosial dan digital kontemporer.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat menjadi perhatian bagi berbagai pemangku kepentingan. Pertama, Pemerintah

Kabupaten Jombang dan Pemerintah Kecamatan Perak perlu mendorong penguatan program pendidikan politik masyarakat yang tidak hanya berfokus pada aspek prosedural Pilkades, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial, literasi digital, serta kapasitas dialog masyarakat desa. Pendekatan preventif berbasis komunitas perlu dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi mitigasi konflik sosial menjelang Pilkades serentak tahun 2027.

Kedua, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat perlu membangun ruang komunikasi sosial yang lebih terbuka dan inklusif agar perbedaan pilihan politik tidak berkembang menjadi polarisasi sosial yang berkepanjangan. Forum dialog masyarakat, diskusi komunitas dan penguatan komunikasi lintas kelompok masyarakat dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga kohesi sosial di desa. Selain itu, unsur Linmas perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek keamanan lingkungan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mampu mendukung deteksi dini dan pencegahan konflik sosial di tingkat lokal.

Ketiga, penguatan literasi digital masyarakat desa perlu menjadi agenda strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Meningkatnya penggunaan media sosial dalam dinamika politik lokal menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kemampuan yang lebih baik dalam memilah informasi, memahami risiko disinformasi, serta menggunakan media digital secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital berbasis konteks lokal perlu dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dari sisi akademik, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian masyarakat berbasis deliberatif dan *civic resilience* memiliki relevansi tinggi dalam merespons tantangan demokrasi lokal di era digital. Oleh karena itu, pengembangan kajian akademik selanjutnya perlu diarahkan pada eksplorasi model-model penguatan demokrasi lokal yang lebih partisipatif, adaptif dan berbasis komunitas. Penelitian dan pengabdian masyarakat di masa-masa yang akan datang juga dapat memperluas fokus pada isu-isu seperti polarisasi digital, ketahanan sosial masyarakat desa, komunikasi politik berbasis komunitas serta pengembangan model literasi digital dalam konteks demokrasi lokal.

Selain itu, pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya dapat diarahkan pada implementasi model *Deliberative Civic Resilience Model* (DCRM) secara lebih luas di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan politik yang berbeda untuk melihat efektivitas dan adaptabilitas model dalam konteks yang lebih beragam. Pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas lokal juga perlu diperkuat agar program pengabdian masyarakat tidak berhenti sebagai kegiatan jangka pendek, tetapi mampu menjadi bagian dari ekosistem penguatan demokrasi lokal dan ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Brawijaya atas dukungan pendanaan melalui Program Dosen Berkarya (DOKAR) Tahun 2026 yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama antara Universitas Brawijaya dan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan Universitas Brawijaya Nomor 180/11/KB/415.10.1.1/2023 dan Nomor 057/UN10/KS/2023 yang ditandatangani pada tahun 2023 oleh Rektor Universitas Brawijaya dan Bupati Jombang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya Pemerintah Kecamatan Perak, atas dukungan, fasilitasi dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penghargaan yang sama diberikan kepada seluruh masyarakat, perangkat desa dan pemangku kepentingan lokal yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhajar, E. N. S., Utari, P., Anggreni, L. S., Hermawati, T., Yudiningrum, F. R., Surwati, C. H. D., Fitri, A., & Pramana, P. (2025). Menjadi Komunikator Kritis di Era AI: Penyusunan Materi Pelatihan Human-Machine Communication (HMC) untuk Mahasiswa. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 111–124. <https://doi.org/10.60004/komunita.v4i2.152>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia* (E. Aspinall & M. Sukmajati (eds.)). NUS Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2>
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community Resilience: Toward an Integrated Approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20. <https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605>
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(9). <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Creswell, J. D., & Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Curato, N., Dryzek, J. S., Ercan, S. A., Hendriks, C. M., & Niemeyer, S. (2017). Twelve key findings in deliberative democracy research. *Daedalus*, 146(3), 28–38. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00444
- Dryzek, J. S. (2010). *Foundations and Frontiers of Deliberative Governance*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199562947.001.0001>
- Fishkin, J. S. (2018). *Democracy When the People Are Thinking: Revitalizing Our Politics Through Public Deliberation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198820291.001.0001>
- Habermas, J. (1996). Between Facts and Normas: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. In *The New Social Theory Reader*. MIT Press. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-4>
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Setianingrum, V. M., Sukardani, P. S., Aji, G. G., Islam, M. A., & Pramana, P. (2025). Menembus Media dengan Pena Guru: Inovasi Literasi Populer di Labschool UNESA. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 204–212. <https://doi.org/10.60004/komunita.v4i2.184>

- Tapsell, R. (2021). Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive, Underground Campaigning. *Asian Studies Review*, 45(1), 117–134. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1841093>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. In *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. (pp. x, 293–x, 293). Yale University Press.
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001>
- van Kempen, L. (2014). Mansuri, Ghazala and Rao, Vijayendra: Localizing development. Does participation work? *Journal of Economics*, 112(2), 201–205. <https://doi.org/10.1007/s00712-014-0394-4>